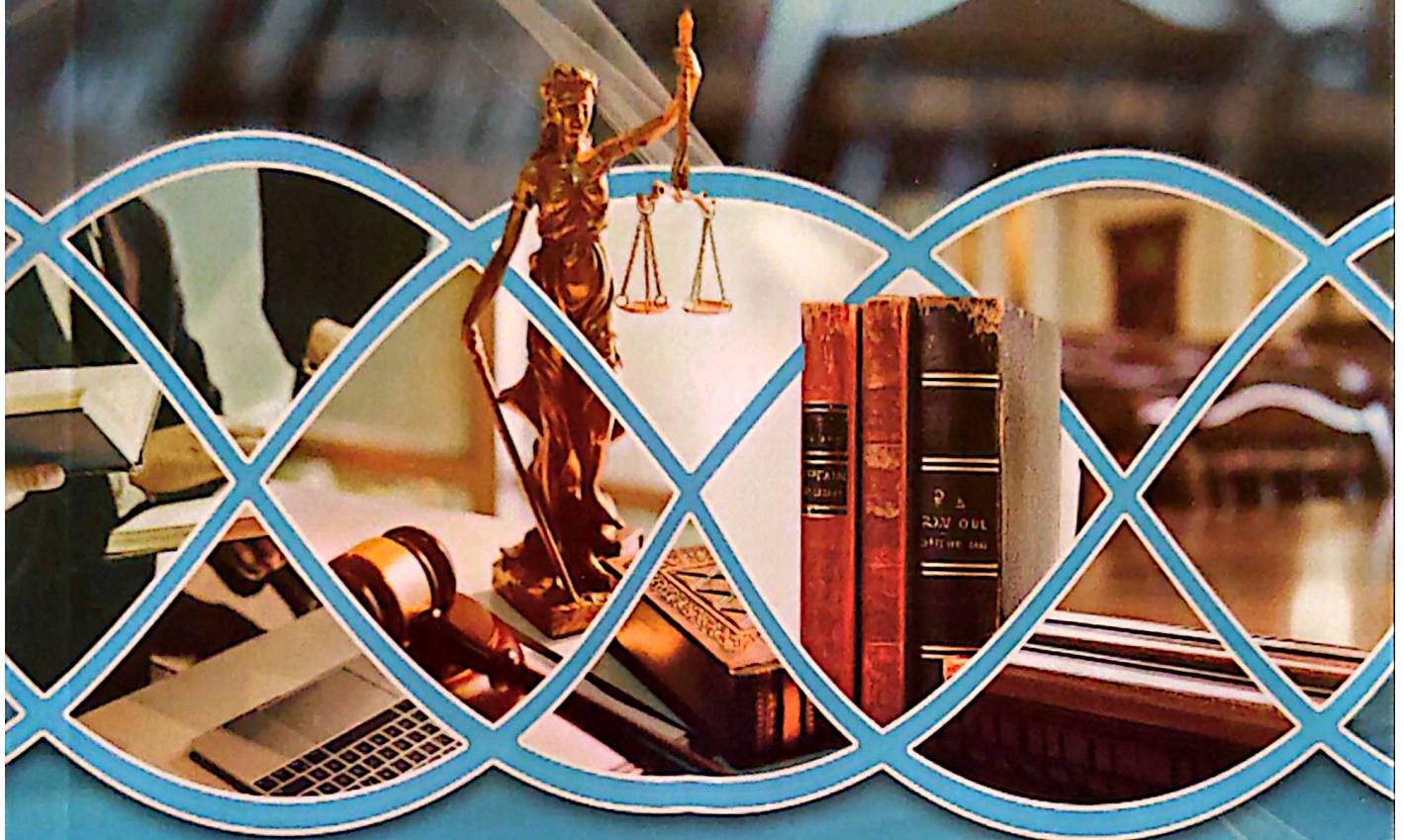


Cetakan ke 2



BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT

Kerja sama antara Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan
Kementrian Hukum Republik Indonesia
dengan Japan International Cooperation Agency

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: DR. DHAHANA PUTRA, Bc.IP, S.H., M.H.

Pengarah

1. Unan Pribadi, S.H., M.H.
2. Muhammad Akram, S.H., M.Si.
3. Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
4. Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.
5. DR. Roberia, S.H., M.H.
6. Hernadi, S.H., M.H.
7. M.Waliadin, S.H., M. Si.
8. Alexander Palti, S.H., M.H.
9. Rudi Hendra Pakpahan, S.H., M.H.
10. Widyastuti, S.H., M.H.

Ketua

Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Sekretaris

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

Anggota

1. RR. Woro Wijayanti, S.H., M.Si.
2. Desi Khairani, S.E.Ak., M.H.
3. Lina Widyastuti, S.H., M.H.
4. Ratih Febriana, S.H., M.H.
5. Andriana Krisnawati, S.H., M.H.
6. M. Manzila Falah, S.H., LLM.
7. Reni Oktri, S.H., M.H.
8. Mila Dahlia, S.H., M.H.
9. Nurillah Amini, S.H., M.H.
10. Prahesti Sekar Kumandani, S.H., M.H.
11. Yanuar Syarifullah, S.H., M.H.
12. Partika Novianti, S.Si.
13. Devi Novita, S.Kom.
14. Rengganis Nurmalasari, S.E.
15. Sisca Mutiara Sari, S.E.
16. Debby Oswani Hutaauruk, S.Kom.

Tim JICA Project

1. Eriko KIKUCHI.
2. Yukiko MAZAWA.
3. Prita Novianti, S.S.



KATA PENGANTAR

**Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Republik Indonesia**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu, Namo buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat menyelesaikan penyusunan BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT. Buku Tanya Jawab ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan merupakan Edisi Kedua penyempurnaan dari Edisi Pertama yang telah diterbitkan pada bulan Desember 2019.

Untuk itu, atas kolaborasi yang sudah terjalin baik dengan JICA tersebut kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada JICA yang selama 10 tahun bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah banyak membantu dan

berkontribusi positif meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia.

Pertu kami sampaikan bahwa Edisi Kedua Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat merupakan penyempurnaan dari edisi pertama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur beberapa aspek baru dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya peningkatan partisipasi publik dan transparansi proses, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik serta metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pada Edisi Kedua ini, Tim Penyusun telah menginventarisasi perubahan serta menyesuaikan pertanyaan dan jawaban dalam Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Pertama agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini. Selain itu pada Edisi Pertama belum terdapat versi elektronik, maka pada Edisi Kedua ini versi E-book telah tersedia dan dapat diakses melalui laman peraturan.go.id.

Penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Edisi Kedua sudah dimulai sejak tahun 2024, diawali dengan proses identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, inventarisasi permasalahan yang sering muncul serta perumusan jawaban atas permasalahan

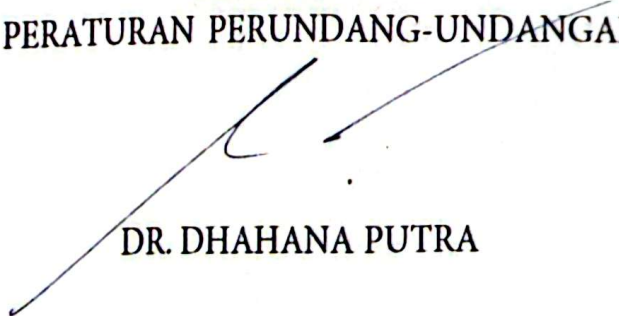
tersebut. Perumusan jawaban dilakukan dengan memperhatikan praktik baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu masukan substansial dari pakar, praktisi, dan akademisi turut memperkaya materi Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk memberikan masukan, saran, dan usulan perbaikan guna menyempurnakan substansi dalam Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua ini. Semoga Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua ini dapat memberikan manfaat yang optimal kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, serta pembentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga jika dalam melaksanakan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan mendapatkan kesulitan, Buku Tanya Jawab ini dapat memberikan jawabannya.

Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Revisi ini.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Jenderal
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,



DR. DHAHANA PUTRA